



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2021**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis ini disusun dalam rangka menyesuaikan perubahan arah Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja. Dokumen Rencana Strategis oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu dua tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen ini.

Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai. Agar dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkajene Sidenreng, 25 Mei 2021
Kepala Dinas Sosial,

SOALIHIN, S. Pd., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19660717 199103 1 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	9
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Dinas Sosial	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	23
3.2 Telaahan Visi Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	24
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Renstra Provinsi	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	28
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	54
7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	54
7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal.....	55



7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang Relevan dengan Perangkat Daerah.....	56
BAB VIII PENUTUP	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan	12
Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	13
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur	14
Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	14
Tabel 5. Jumlah Kendaraan Operasional.....	15
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	16
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial	18
Tabel 2.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019.....	19
Tabel 2.3.3 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020-2023.....	20
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial	29
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	31
Tabel T-C.27 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020	33
Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023.....	45
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52
Tabel 7.1 Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	53
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	54
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	55
Tabel 7.4 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Tahun 2020-2023.....	56
Tabel 7.5 Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020-2023.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana strategis SKPD untuk periode lima (5) tahun mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Disisi lain Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Perubahan Rencana strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan oleh peraturan Daerah. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan revisi program jangka menengah 5 (lima) tahun yang perumusannya berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Selain hal tersebut Perubahan Rencana Strategis karena adanya bencana non alam pandemic (**covid-19**) sehingga terjadi resesi ekonomi, perubahan kebijakan, dan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Fungsi Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial agar lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan baik tujuan, sasaran, program maupun anggaran



dengan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 dengan Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024, dengan memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku selaku bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah.

Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 diharapkan mampu meningkatkan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 memuat misi:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”.

Dalam pencapaian misi diatas perlu dilakukan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang memasuki tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang, termasuk didalamnya pembangunan administrasi kesejahteraan sosial.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada



11. Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



21. Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease



2019 (Covid-19);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).
37. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Sosial.



3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dalam mensejahterakan masyarakat.

Tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Sosial tahun 2018-2023:

1. Memberikan arah dan pedoman Dinas Sosial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta dalam menentukan indikator, target kinerja jangka menengah Dinas Sosial.
2. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.
3. Sebagai bahan evaluasi tahunan dan lima tahunan pelaksanaan kegiatan, program dan pencapaian sasaran Dinas Sosial dan Bahan Rujukan penyusunan Renja Tahun 2018 hingga 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang memuat Pengertian, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang, yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan tugas dan fungsi, telaahan visi misi dan program kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, telaahan renstra kementerian, kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan visi, misi dan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai



indikasi keberhasilan Dinas Sosial Kab. Sidenreng Rappang dalam memimpin OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang Sosial
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Sosial
- d. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial
- e. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi sosial
- h. Pelaksanaan bantuan, jaminan, dan perlindungan sosial
- i. Pengelolaan data fakir miskin
- j. Pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial
- k. Penanganan penyandang masalah sosial
- l. Pelaksanaan rehabilitasi sosial
- m. Pengelolaan taman makam pahlawan
- n. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta kesetiakawanan sosial.



2.1.3 Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.

- **Sub bagian perencanaan dan keuangan** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- **Sub bagian umum dan kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

- **Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Disabilitas, dan Lanjut Usia** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan lanjut usia terlantar.



- **Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- **Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan bencana, warga negara migran, dan taman makam pahlawan.

- **Seksi Pemberdayaan Sosial** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- **Seksi Penanganan Bencana** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan bencana.
- **Seksi Penanganan Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan** dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi



pelaksanaan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan pengelolaan taman makam pahlawan.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
Golongan IV	1	1	1	-	3	13,04
Golongan III	-	4	6	4	14	60,87
Golongan II	-	4	1	1	6	26,09
Golongan I	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	9	8	5	23	100,00

Berdasarkan tabel di atas golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 60,87 persen dari total pegawai sebesar 14 orang. Urutan kedua terbesar adalah golongan II sebesar 26,09 persen sebanyak 6 orang. Selanjutnya sebesar 13,04 persen berada pada golongan IV sebanyak 3 orang. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.



Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
S-3	-	-	-	-	-	0,00
S-2	1	1	4	1	7	30,43
S-1	-	3	4	3	10	43,48
Diploma I-III	-	1	-	-	1	4,35
SMA Sederajat	-	4	-	1	5	21,74
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	9	8	5	23	100,00

Pada tabel di atas dapat dilihat Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 ke atas. Dengan proporsi S1 sebanyak 43,48 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 30,43 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan pelayanan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.



Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
25 – 30	-	-	1	-	1	4,35
31 – 40	-	3	4	-	7	30,43
41 – 50	-	6	3	3	12	52,17
51 – 58	1	-	-	2	3	13,04
Jumlah	1	9	8	5	23	100.00

Berdasarkan kelompok umur, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada usia 41 – 50 sebanyak 12 orang atau 52,17 persen, sedangkan kelompok umur 31 – 40 tahun berada pada urutan kedua dengan jumlah sebanyak 7 orang atau 30,43 persen. Selanjutnya usia 51 – 58 sebanyak 3 orang atau 13,04 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 25 – 30 sebanyak 4,35 persen dengan jumlah pegawai sebesar 1 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada				Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Resos dan Linjamsos	Bidang Dayasos dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan TMP		
Perempuan	-	3	4	4	11	47,83
Laki-Laki	1	6	4	1	12	52,17
Jumlah	1	9	8	5	23	100,00



Berdasarkan Jenis Kelamin jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang dengan persentase 47,83% dan sebanyak 12 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 52,17 persen.

2.2.2 Dukungan Sarana dan Prasarana

Menurut Jumlah kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kendaraan Operasional

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Roda 4	-	-	2	2
Roda 2	-	-	6	6
Jumlah	-	-	8	8

Kendaraan dinas yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 8 unit, dengan rincian sebanyak 2 unit kendaraan roda 4 dengan kondisi yang rusak berat, sedangkan kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit dengan kondisi rusak berat.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian kinerja juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2013-2017.

2.3.1 Kinerja Renstra Dinas Sosial Periode 2014-2018

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dalam periode 2018-2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
					2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Jumlah PMKS		12,093		12,093	12,083	12,080	12,080	10,300		12,080	12,080	12,063	10,043	10,300		99,89	99,97	99,85	99,69	99,45	
2	Tertanganinya korban bencana																					
3	Meningkatnya pengawasan dan pendistribusian beras bagi warga miskin																					
4	Penanganan korban bencana dengan baik																					
5	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma																					
6	Penanganan PMKS bermasalah sosial																					
7	Tersedianya tenaga pendamping sosial																					
8	Tercapainya perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM)																					
9	Peningkatan peran aktif kelembagaan dan keajahteraan sosial																					
10	Pengembangan model kelembagaan jaminan sosial																					
11	Terwujudnya Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS																					
12	Meningkatkan taraf hidup dan penghidupan AT																					



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

13	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial																				
14	Persentase PMKS yang tertangani																				
15	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar																				
16	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya																				
17	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial																				
18	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial																				
19	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat																				
20	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap																				
21	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial																				

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.471.190.000	978.883.500	451.965.500				915.280.511	909.731.530	352.297.835	-43,65	-30,34
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				274.150.000	147.378.000	281.946.000				37.183.567	62.360.527	195.511.570	22,53	140,61
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				95.660.000	109.038.500	58.021.000				72.225.250	106.345.800	57.336.000	-16,40	0,58
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				2.881.648.000	411.200.000	199.127.500				1.861.530.501	411.176.000	70.933.266	-66,47	-80,33
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				122.366.000						120.256.000				-50,00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)				1.250.845.000	650.000.000	400.176.000				728.685.500	6.162.033.000	391.956.500	-43,23	326,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		786.000.000	888.195.000	905.694.000	643.435.000	759.731.000				693.383.350	627.307.150	752.449.208	-5,44	5,21
Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial				290.458.000	172.000.000	104.998.000				209.279.500	170.457.500	100.866.500	-39,87	-29,69
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				126.421.500	72.450.000	87.460.000				92.271.500	61.984.500	86.569.000	-10,99	3,42



2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Standar Pelayanan tahun 2019 Dinas Sosial yang menjadi pengampu Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3.2
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemerintahan
Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	73.33%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	90,2%	33,33%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	6.67%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	6.67%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%



2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2015-2019 yang relevan dengan Perangkat Daerah. Format Tabel TPB/SDGs dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3.3
Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020-2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN								
Tujuan SDGs 01 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN								
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	-	-	-	0,0516	0,0479	0,0479
1.3.1.(c)	Presentase Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	KPM	-	-	-	260	305	369
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	-	-	-	7.416	7.424	8.448
1.5.1. (b)	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	%	-	-	-	100	100	100
1.5.1. (c)	Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial		-	-	-	-	-	-
1.5.1. (d)	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB-Sekolah/Madrasah Aman Bencana)		-	-	-	-	-	-
1.a.1 *	Proporsi Sumber Daya yang dialokasikan oleh Pemerintah secara langsung untuk Program Pemberantasan Kemiskinan	KPM	-	-	-	11.935	107.329	16.336
TUJUAN : 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
TUJUAN SDGs : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA								



10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini	%	-	-	-	0,34	0,284	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	%	-	-	-	0,0516	0,0479	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	%	-	-	-	0,2695	0,2695	0,2695
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	-	-	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Dinas Sosial

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana kerja pelayanan Dinas Sosial memiliki nilai strategis, permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan ini yang dihadapi oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya sehingga memerlukan koordinasi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan melibatkan hingga pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat sehingga penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kab. Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Kecenderungan berkembangnya individualisme dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial.



2. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial.

2.4.2 Peluang

Selanjutnya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan terkait dengan tugas dan fungsi, kondisi wilayah dan perubahan iklim politik ditemukan beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Dinas Sosial Kab. Sidenreng Rappang 5 (lima) tahun kedepan dalam pengembangan pelayanan antara lain .

1. Dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penjunjung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Semakin meningkatnya komitmen legislative dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meningkat.
3. Telah ditetapkannya perda tentang RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kabupaten.
4. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan akan dilakukan pemetaan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode sebelumnya. Sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat 5 (lima) tahun mendatang dapat secara efektif dan efisien memecahkan masalah, karena permasalahan ini merupakan dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi titik fokus kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan sebagai berikut:

No.	Bidang Urusan/Indikator	Masalah	Solusi
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	Masih terdapat PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial	Dukungan pemerintah daerah dan stake holder
2	Persentase PMKS yang tertangani	Masih adanya PMKS yang belum tertangani	Dukungan pemerintah daerah dan stake holder
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Masih adanya PMKS yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya	Melakukan verifikasi dan validasi data PMKS
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Program KUBE sudah tidak dijalankan di Dinas Sosial Kabupaten Sidrap	Dukungan Dari Pemerintah provinsi



5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	Kegiatan WKBSM belum pernah dilaksanakan	Tersedianya WKBSM
---	---	--	-------------------

3.2 Telaahan Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, maka dalam merencanakan pembangunan social di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang social berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih. Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”.

Sedangkan Misi yang telah ditetapkan adalah:

- a. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- b. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
- e. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.



- f. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (*smart village*), sehat dan mandiri.
- g. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Adapun Misi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang Sosial ditelaah sebagai berikut:

- a. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang Sosial adalah:
 - 1. Meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi PMKS.
 - 2. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang sosial yang layak, memadai dan berkualitas.
 - 3. Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana alam/sosial.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah pembinaan Kementerian Sosial dengan Visi Misi selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program maupun kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu kepada Renstra Kementerian Sosial RI dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial membantu peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan terdapat 5 (lima) tantangan utama serta permasalahan yang akan dihadapi, yaitu:

- 1. Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat.



2. Memastikan kesempatan yang sama untuk semua dalam peningkatan sosial ekonomi.
3. Memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi serta perlindungan sosial.
4. Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.
6. Pembiayaan dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, Perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui proses pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Dimana Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah mendukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dimana setiap tujuan TPB/SDGs memiliki target dan indikator yang terkait dengan fungsi Dinas Sosial.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam dalam rangka merelisasikan setiap program SKPD dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal. Yang kedua dukungan peralatan yang memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategis yang dimaksud tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi



semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati instansi yang ada dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial. Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDG's.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kebijakan-kebijakan nasional mempengaruhi pemerintah daerah, misalnya kewajiban untuk melakukan refocussing dan realokasi anggaran untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh dalam bidang sosial, sehingga diperlukan berbagai strategi dalam penyelenggaraannya.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan sosial selama lima tahun yang akan datang adalah:

1. Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin
			Jumlah PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)
			Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Sosial



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial sampai tahun 2019. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2018-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan sosial. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial tahun 2018-2023 terangkum dalam table berikut:



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera							
MISI : 2 Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Melakukan pendataan dan inventarisir jumlah penduduk dan PSKS yang mendukung penanggulangan kemiskinan	Perlu inventarisir penduduk miskin (KPM) dan PSKS yang mendukung penanggulangan kemiskinan	Pemadanan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	Penyusunan indikator kemiskinan local	Peningkatan kapasitas PSKS	Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan disiplin kerja, kualitas SDM dan profesionalitas aparatur, penataan kelembagaan, peningkatan sistem pengawasan dalam berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi.	Penataan kelembagaan dan peningkatan SDM aparatur	Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan melekatkan dukungan, pembinaan dan pengawasan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel T-C.27
Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kab. Sidrap	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kab. Sidrap		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	915.280.511		909.731.530		352.297.835	Dinsos	Kab. Sidrap
				% temuan BPK dan APIP yang ditindak lanjuti						Dinsos	Kab. Sidrap
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mendokumentasikan sesuai standar	3.756.000	1500 Lembar	1.656.000	1500 Lembar	1.500.000	Dinsos	Kab. Sidrap
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik kantor	53.649.359	9 Bulan	53.773.100	12 Bulan	17.427.885	Dinsos	Kab. Sidrap
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlindunginya barang/aset milik daerah	16.472.820	2 Unit	10.681.190	12 Bulan	4.364.250	Dinsos	Kab. Sidrap
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sistem pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.559.125	2,25 Unit	5.674.540	4 Unit	1.287.500	Dinsos	Kab. Sidrap
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatkan sistem pelayanan administrasi keuangan	136.557.000	12 Bulan	165.899.300	12 Bulan	-	Dinsos	Kab. Sidrap
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan kebersihan gedung kantor	55.280.000	12 Bulan	52.640.000	12	29.017.000	Dinsos	Kab. Sidrap
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan	4.993.000	12 Bulan	2.300.000	12	3.037.000	Dinsos	Kab. Sidrap
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Menambah pengetahuan dan shering pendapat dengan daerah lain	116.155.082	250 Kali	147.084.400	160	80.526.200	Dinsos	Kab. Sidrap
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya alat perkantoran	526.858.125	12 Bulan	470.023.000	12	215.138.000	Dinsos	Kab. Sidrap

**PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	% pemenuhan sarana-prasarana aparatur	37.183.567		62.360.527		195.511.570	Dinsos	Kab. Sidrap	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	-	29 Unit	47.113.000	Dinsos	Kab. Sidrap	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor sesuai analisis kebutuhan	-	1 Unit	14.560.000	1 Unit	70.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		-	-	-	12 Unit	36.312.000	Dinsos	Kab. Sidrap	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional sesuai analisis kebutuhan	33.383.567	24 Unit	32.160.527	4 Unit	38.346.750	Dinsos	Kab. Sidrap	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor sesuai analisis kebutuhan	1.700.000	15 Unit	2.000.000	7 Unit	840.000	Dinsos	Kab. Sidrap	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sesuai analisis kebutuhan	2.100.000	10 Unit	13.640.000	4 Unit	2.900.000	Dinsos	Kab. Sidrap	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% peningkatan Kedisiplinan Aparatur	-	-	-	-	-	-	Dinsos	Kab. Sidrap
	Pengadaan Pakaian Dinas	Untuk Meningkatkan Kedisiplinan ASN dengan adanya pakaian seragam	-	-	-	-	-	-	Dinsos	Kab. Sidrap
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Untuk Meningkatkan Kedisiplinan ASN dengan adanya pakaian seragam	-	-	-	-	-	-	Dinsos	Kab. Sidrap
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	Untuk Meningkatkan Kedisiplinan ASN dengan adanya pakaian seragam	-	-	-	-	-	-	Dinsos	Kab. Sidrap
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase capaian kinerja dan keuangan	72.225.250		106.345.800		57.336.000	Dinsos	Kab. Sidrap	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya laporan yang tepat waktu	72.225.250	6 Laporan	106.345.800	6 Laporan	57.336.000	Dinsos	Kab. Sidrap	

**PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

Meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan berbasis SPM bagi PMKS		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial					86.569.400	Dinsos	Kab. Sidrap
			Pelatihan keterampilan barusaha bagi keluarga miskin	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, AT serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		49,98 Orang		99%	86.569.400	Dinsos	Kab. Sidrap
			Program Pencapaian SPM	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial						Dinsos	Kab. Sidrap
				Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti						Dinsos	Kab. Sidrap
				Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti						Dinsos	Kab. Sidrap
				Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti						Dinsos	Kab. Sidrap
				Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti						Dinsos	Kab. Sidrap
			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%		96%	99.094.500	Dinsos	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

	Pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-					Dinsos	Kab. Sidrap
	Melakukan pendataan penyandang disabilitas diluar panti	Persentase jumlah penyandang disabilitas di luar panti	-					Dinsos	Kab. Sidrap
	Melakukan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah disabilitas	memberi bekal keterampilan untuk berusaha sendiri	-		100%	1.772.000		Dinsos	Kab. Sidrap
	Kegiatan pendataan anak terlantar diluar panti	Persentase jumlah anak terlantar di luar panti	-					Dinsos	Kab. Sidrap
	Kegiatan paket bantuan/pelatihan keterampilan bagi anak terlantar	Memberi bekal keterampilan untuk berusaha sendiri	-					Dinsos	Kab. Sidrap
	Pendataan lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase jumlah lanjut usia diluar panti	-					Dinsos	Kab. Sidrap
	Paket bantuan bagi lanjut usia	Untuk meningkatkan taraf hidup lanjut usia	-					Dinsos	Kab. Sidrap
	Melakukan pendataan gelandangan /pengemis	Persentase jumlah tuna sosial (gelandangan/pengemis)	-					Dinsos	Kab. Sidrap
	Memberikan paket bantuan usaha bagi gelandangan/pengemis yang terdata secara bertahap	Membina gelandangan & pengemis untuk beruaha	-					Dinsos	Kab. Sidrap
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah tempat-tempat rintisan kemerdekaan yang tertangani				70.933.266		Dinsos	Kab. Sidrap
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan bagi PMKS	Pemberdayaan para PMKS dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan taraf hidup	75%		100%	28.016.366		Dinsos	Kab. Sidrap
	Penanganan tempat-tempat rintisan kemerdekaan dan nilai-nilai kepahlawanan	Persentase jumlah TMP, monumen dan tempat-tempat rintisan kemerdekaan lainnya yang tertangani	-		-	-		Dinsos	Kab. Sidrap
	Melakukan pendataan/verifikasi dan validasi basis data terpadu	Persentase jumlah masyarakat miskin	-		30%	42.916.900		Dinsos	Kab. Sidrap

**PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga panti asuhan, SDLB, LVRI yang diberdayakan					752.449.208	Dinsos	Kab. Sidrap
	Kegiatan peningkatan peran aktif kelembagaan dan kesejahteraan sosial	Persentase kelompok organisasi sosial LKSA yang telah dibina		5 LKSA		5 LKSA	556.149.750	Dinsos	Kab. Sidrap
	Kegiatan pengembangan model kelembagaan jaminan sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		100%		7416 KPM	196.299.458	Dinsos	Kab. Sidrap
	Kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan bantuan pembinaan LVRI	Persentase jumlah anggota LVRI dan masyarakat lainnya yang menerima bantuan dan mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan		-		100%	-	Dinsos	Kab. Sidrap
	Bakti sosial dalam rangka hari Kesetiakawanan Sosial	Persentase keikutsertaan dalam bakti sosial		-		100%	-	Dinsos	Kab. Sidrap
	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina					391.956.500	Dinsos	Kab. Sidrap
	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya pembinaan eks penyandang penyakit sosial		100%		10 Orang	391.956.500	Dinsos	Kab. Sidrap
	Pelatihan keterampilan ex. narapidana & ex.PSK	Tercapainya pemulihan kembali harga diri para bekas narapidana untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat		-		-	-	Dinsos	Kab. Sidrap
	Sosialisasi P4GN bagi masyarakat & pelajar	Memberi edukasi tentang bahaya dampak narkoba		-		-	-	Dinsos	Kab. Sidrap



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (intermediate output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial				Persentase Warga Negara yang Diberdayakan dan Menerima Perlindungan Sosial	75,74 Persen	94,4 Persen		84,9 Persen		76,4 Persen		76,4		Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat			Jumlah Rumah Tangga Miskin	20513 KK	16208 KK		14588 KK		13126 KK		13126 KK		Dinas Sosial	Kab. Sidrap
				Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	44 Orang	120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		Dinas Sosial	Kab. Sidrap
				Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	8 Lembaga	8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina		100	383.855.000	100	993.251.000	100	1.003.183.510	100	2.380.289.510	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani		100	383.855.000	100	993.251.000	100	1.003.183.510	100	2.380.289.510	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Berpotensi Mendapatkan Penguatan Berinovasi dan Terus Beradaptasi		0	0	11	30.000.000	11	30.300.000	22	60.300.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Menerima Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu		10.614		33.855.000	10.614		93.251.000	10.614		94.183.510	31.842		221.289.510	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dibina		6		350.000.000	6		870.000.000	6		878.700.000	18		2.098.700.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Yang Tertangani		0		0	100		1.500.000	100		1.515.000	100		3.015.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran yang Dipulangkan		0		0	100		1.500.000	100		1.515.000	100		3.015.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran yang Difasilitasi untuk Dipulangkan		0		0	1		1.500.000	1		1.515.000	2		3.015.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina		100		798.367.000	100		268.340.000	100		383.640.000	100		1.450.347.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi		100		112.968.000	100		268.340.000	100		383.640.000	100		764.948.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti		15		69.063.000	15		137.640.000	15		140.640.000	45		206.703.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti		590		14.635.000	590		33.566.669	590		81.000.000	1770		129.201.669	Dinas Sosial	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

				Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	31	14.635.000	31	33.566.662	31	81.000.000	93	129.201.662	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
				Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	1549	14.635.000	1549	33.566.669	1549	81.000.000	4647	129.201.669	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Warga Negara yang Diberi Layanan Kedaruratan	0	0	10	30.000.000	0	0	10	30.000.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi	100	685.399.000	0	0	0	0	0	685.399.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Yang Bekerja Sama Memberi Edukasi Tentang Bahaya Dampak Narkoba	1	685.399.000	0	0	0	0	0	685.399.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin	100	217.378.000	100	140.001.060	100	156.401.070	100	513.780.130	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.05.2.02	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Tertangani	0	0	100	7.000.000	100	7.070.000	100	14.070.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.05.2.02.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani	0	0	10	7.000.000	10	7.070.000	20	14.070.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	100	217.378.000	100	133.001.060	100	149.331.070	100	499.710.130	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola	5709	217.378.000	12951	133.001.060	12951	140.000.000	31611	490.379.060	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mendapat Fasilitas Bantuan Sosial	0	0	0	0	5000	9.331.070	5000	9.331.070	Dinas Sosial	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial		100	193.630.000	100	198.500.000	100	200.000.000	100	592.130.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial		0	0	0	0	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.01.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Bantuan Paket Permakanan		0	0	0	0	80	30.000.000	80	30.000.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana		100	193.630.000	100	198.500.000	100	170.000.000	100	562.130.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang Diberdayakan		37	193.630.000	37	198.500.000	37	170.000.000	111	562.130.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.07	PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani		100	42.881.000	100	79.500.000	100	80.295.000	100	202.676.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		100	42.881.000	100	79.500.000	100	80.295.000	100	202.676.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan, Monumen dll Yang Telah Direhabilitasi		3	42.881.000	3	79.500.000	3	80.295.000	9	202.676.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial				Persentase Warga Negara yang Diberdayakan dan Menerima Perlindungan Sosial	75,74 Persen	94,4 Persen		84,9 Persen		76,4 Persen		76,4 Persen	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai SAKIP	52,64 (CC) Kategori	60 (B) Kategori		65 (B) Kategori		70 (B) Kategori		70 (B) Kategori		Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2.437.752.000	100	3.427.827.310	100	3.513.522.993	100	9.379.102.303,10	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	88.949.000	100	49.077.310	100	49.568.083	100	187.594.393	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun		6	88.949.000	6	49.077.310	6	49.568.083	18	187.594.393	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.918.347.000	100	2.233.500.000	100	2.255.835.000	100	6.407.682.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	1.879.631.000	12	2.200.000.000	12	2.222.000.000	36	6.301.631.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan		12	38.716.000	12	5.000.000	12	5.050.000	36	48.766.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0	0	12	16.000.000	12	16.160.000	24	32.160.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun		0	0	1	2.500.000	1	2.525.000	2	5.025.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.02.0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0	0	1	5.000.000	1	5.050.000	2	10.050.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Disusun		0	0	12	5.000.000	12	5.050.000	24	10.050.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
	01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah		100	8.000.000	100	17.000.000	100	17.170.000	100	42.170.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

		01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun		0	0	1	3.500.000	1	3.535.000	2	7.035.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		0	0	1	3.500.000	1	3.535.000	2	7.035.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah		13	8.000.000	13	10.000.000	13	10.100.000	39	28.100.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah		0	0	100	14.350.000	100	9.700.910	100	24.050.910	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawian		0	0	2	10.000.000	2	5.307.410	4	15.307.410	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	0	2	4.350.000	2	4.393.500	4	8.743.500	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	153.064.000	100	335.000.000	100	373.350.000	100	861.414.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12	32.410.000	12	15.000.000	12	15.150.000	36	62.560.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		0	0	0	0	29	35.000.000	29	35.000.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0	0	12	12.000.000	12	12.120.000	24	24.120.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar maupun dalam Daerah yang Dilaksanakan		210	120.654.000	210	308.000.000	210	311.080.000	630	739.734.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	30.130.000	100	205.500.000	100	207.555.000	100	443.185.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	50	5.838.000	50	70.500.000	50	71.205.000	150	147.543.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan	50	24.292.000	50	135.000.000	50	136.350.000	150	295.642.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	199.740.000	100	208.000.000	100	210.080.000	100	617.820.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	1.500.000	1500	2.000.000	1500	2.020.000	4500	5.520.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	12	36.000.000	12	36.360.000	24	72.360.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	198.240.000	12	170.000.000	12	171.700.000	36	539.940.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	39.522.000	100	365.400.000	100	390.264.000	100	795.186.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	13	39.522.000	13	152.400.000	13	153.924.000	39	345.846.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	0	0	13	13.000.000	13	13.130.000	13	26.130.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara	0	0	1	200.000.000	1	202.000.000	2	402.000.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	25	21.210.000	25	21.210.000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap
						4.073.863.000		5.108.919.370		5.338.557.573				

Tabel 6.1
Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2019	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			NON URUSAN										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2.437.752.000	100	3.427.827.310	100	3.513.522.993	Dinsos	Kab. Sidrap
	01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	88.949.000	100	49.077.310	100	49.568.083	Dinsos	Kab. Sidrap
	01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	6	6	88.949.000	6	49.077.310	6	49.568.083	Dinsos	Kab. Sidrap
	01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	1.918.347.000	100	2.233.500.000	100	2.255.835.000	Dinsos	Kab. Sidrap
	01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	1.879.631.000	12	2.200.000.000	12	2.222.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
	01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan	12	12	38.716.000	12	5.000.000	12	5.050.000	Dinsos	Kab. Sidrap
	01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	0	0	12	16.000.000	12	16.160.000	Dinsos	Kab. Sidrap
	01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1	0	0	1	2.500.000	1	2.525.000	Dinsos	Kab. Sidrap
	01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	0	0	1	5.000.000	1	5.050.000	Dinsos	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Disusun	12	0	0	12	5.000.000	12	5.050.000	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100	8.000.000	100	17.000.000	100	17.170.000	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	0	0	1	3.500.000	1	3.535.000	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	0	0	1	3.500.000	1	3.535.000	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2	13	8.000.000	13	10.000.000	13	10.100.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	0	100	14.350.000	100	9.700.910	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	0	0	2	10.000.000	2	5.307.410	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	0	0	2	4.350.000	2	4.393.500	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	153.064.000	100	335.000.000	100	373.350.000	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	32.410.000	12	15.000.000	12	15.150.000	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	50	0	0	0	0	29	35.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	0	0	12	12.000.000	12	12.120.000	Dinsos	Kab. Sidrap
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Maupun dalam Daerah yang Dilaksanakan	250	210	120.654.000	210	308.000.000	210	311.080.000	Dinsos	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	30.130.000	100	205.500.000	100	207.555.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	100	50	5.838.000	50	70.500.000	50	71.205.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan	100	50	24.292.000	50	135.000.000	50	136.350.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	199.740.000	100	208.000.000	100	210.080.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	1500	1.500.000	1500	2.000.000	1500	2.020.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	0	0	12	36.000.000	12	36.360.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	198.240.000	12	170.000.000	12	171.700.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	39.522.000	100	365.400.000	100	390.264.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	24	13	39.522.000	13	152.400.000	13	153.924.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50	0	0	13	13.000.000	13	13.130.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara	1	0	0	1	200.000.000	1	202.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	0	25	21.210.000	Dinsos	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina	100	100	383.855.000	100	993.251.000	100	1.003.183.510	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	100	100	383.855.000	100	993.251.000	100	1.003.183.510	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Berpotensi Mendapatkan Penguatan Berinovasi dan Terus Beradaptasi	0	0	0	11	30.000.000	11	30.300.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Menerima Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	8.422	10.614	33.855.000	10.614	93.251.000	10.614	94.183.510	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dibina	5	6	350.000.000	6	870.000.000	6	878.700.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Yang Tertangani	0	0	0	100	1.500.000	100	1.515.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran yang Dipulangkan	0	0	0	100	1.500.000	100	1.515.000	Dinsos	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

1.06.03. 2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran yang Difasilitasi untuk Dipulangkan	0	0	0	1	1.500.000	1	1.515.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina	100	100	798.367.000	100	268.340.000	100	383.640.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.04. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	100	100	112.968.000	100	268.340.000	100	383.640.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.04. 2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	7	15	69.063.000	15	137.640.000	15	140.640.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.04. 2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	10	590	14.635.000	590	33.566.669	590	81.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	10	31	14.635.000	31	33.566.662	31	81.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	10	1549	14.635.000	1549	33.566.669	1549	81.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.04. 2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Warga Negara yang Diberi Layanan Kedaruratan	0	0	0	10	30.000.000	10	0	Dinsos	Kab. Sidrap

**PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL**

Kabupaten Sidenreng Rappang

1.06.04. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi	100	100	685.399.000	0	0	0	0	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.04. 2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Yang Bekerja Sama Memberi Edukasi Tentang Bahaya Dampak Narkoba	100	1	685.399.000	0	0	0	0	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin	100	100	217.378.000	100	140.001.060	100	156.401.070	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.05. 2.02	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Tertangani	100	0	0	100	7.000.000	100	7.070.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.05. 2.02.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani	0	0	0	10	7.000.000	10	7.070.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.05. 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	100	100	217.378.000	100	133.001.060	100	149.331.070	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.05. 2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola	12951	5709	217.378.000	12951	133.001.060	12951	140.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.05. 2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	5000	9.331.070	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	193.630.000	100	198.500.000	100	200.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.06. 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	0	0	0	0	0	100	30.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.01. 2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Bantuan Paket Permakanan	0	0	0	0	0	80	30.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

1.06.06. 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kasiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100	100	193.630.000	100	198.500.000	100	170.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.06. 2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang Diberdayakan	25	37	193.630.000	37	198.500.000	37	170.000.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.07	PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat- Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100	100	42.881.000	100	79.500.000	100	80.295.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.07. 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	100	42.881.000	100	79.500.000	100	80.295.000	Dinsos	Kab. Sidrap
1.06.07. 2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan, Monumen dll Yang Telah Direhabilitasi	14	3	42.881.000	3	79.500.000	3	80.295.000	Dinsos	Kab. Sidrap
					4.073.863.000		5.108.919.370		5.338.557.573		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai, jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Adapun indikator kinerja sasaran dan program Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dimaksud, dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2019	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	57,2	85	90	95	100	100	100
2	Persentase Angka PMKS	97,2	80	85	90	95	97	97
3	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Kebencanaan	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Layanan Kebencanaan Pada Masyarakat (Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana)	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Layanan Pengurangan Resiko Bencana Pada Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100	100	100	100	100	100



Tabel 7.1
Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja pada Akhir Perubahan Renstra
								2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Persentase Warga Negara yang Diberdayakan dan Menerima Perlindungan Sosial	32,06	75,74	94,4	84,9	76,4	76,4	
							Jumlah Rumah Tangga Miskin	20.513	18.008	16.208	14.588	13.126	13.126	
							Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	54.426	54.976	55.532	56.087	56.647	56.647	
							Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	6	6	6	6	7	7	
							Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Sosial	Predikat Nilai SAKIP		CC	B	B	B	B



7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang berasal dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
Urusan Bidang Sosial			
1	Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada}} \times 100\%$
		Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$
		Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina}}{\text{Jumlah Lembaga Sosial yang ada}} \times 100\%$

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang berasal dari indikator Program dan Indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 yaitu Perubahan Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023		
Urusan Bidang Sosial									
1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial ----- x 100% Jumlah PMKS yang ada	85	90	95	100	100	100	
2	Persentase Angka PMKS	Jumlah penurunan angka PMKS ----- x 100% Jumlah PMKS yang ada	80	85	90	95	97	100	
3	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Kebencanaan	Jumlah korban bencana yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan urusan kebencanaan ----- x 100% Jumlah korban bencana yang ada	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Layanan Kebencanaan Pada Masyarakat (Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan kebencanaan pada masa pra bencana ----- x 100% Jumlah masyarakat yang ada	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Layanan Pengurangan Resiko Bencana Pada Masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan pengurangan resiko bencana ----- x 100% Jumlah masyarakat yang ada	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Jumlah korban bencana yang tertangani ----- x 100% Jumlah korban bencana yang ada	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Jumlah korban bencana yang tertangani pasca bencana ----- x 100% Jumlah korban bencana yang ada	100	100	100	100	100	100	

7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Indikator Standar Pelayanan Minimal perangkat daerah pengampu SPM

sebagai berikut:

Tabel 7.4
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Tahun 2020-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja		Target Capaian			
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	73.33%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	90.2%	33,33%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	6.67%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	6.67%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang relevan dengan Perangkat Daerah

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang relevan dengan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5
Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020-2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	
TUJUAN 01 Tanpa Kemiskinan								
Tujuan SDGs 01 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun								
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	0,0479	0,04	0,03	0,02	0,01	



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 DINAS SOSIAL
Kabupaten Sidenreng Rappang

1.3.1.(c)	Presentase Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	KPM	305	308	310	320	330
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	7.424	7425	7430	7440	7450
1.5.1. (b)	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	%	100	100	100	100	100
1.5.1. (c)	Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial		-				
1.5.1. (d)	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB-Sekolah/Madrasah Aman Bencana)		-				
1.a.1 *	Proporsi Sumber Daya yang dialokasikan oleh Pemerintah secara langsung untuk Program Pemberantasan Kemiskinan	KPM	107.329	15000	20000	22000	25000
TUJUAN : 10 Berkurangnya Kesenjangan							
Tujuan SDGs : Mengurangi Kesenjangan Intra - dan Antar Negara							
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1*	Koefisien Gini	%	0,284	0,25	0,2	0,15	0,1
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	%	0,0479	0,03	0,02	0,01	0,009
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	%	0,2695	0,25	0,23	0,21	0,18
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	-	-	-	-	-



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018-2023 merupakan revisi dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018-2023 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam tiga tahun ke depan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu 2018-2023 bergantung pada kerjasama antara Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder sosial.

Harapan kami semoga Perubahan Rencana strategis ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas di bidang sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang di masa akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 25 Mei 2021
Kepala Dinas Sosial,

SOALIHIN, S.Pd., M.Si.

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19660717 199103 1 018